



# **INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN LEBONG 2019**

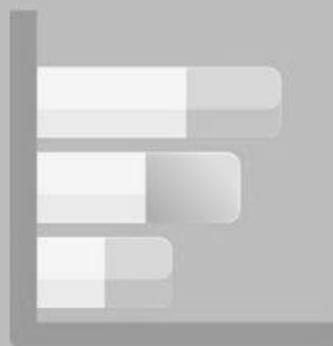


 **BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**





# **INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN LEBONG 2019**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**



## **INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019**

ISBN :  
Nomor Publikasi :  
Nomor Katalog :

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xiii + 49 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Gambar Kulit:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Diterbitkan Oleh:  
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Dicetak Oleh:  
Percetakan Negara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

# INDIKATOR SOSIAL EKONOMI

## KABUPATEN LEBONG 2019

---

### Tim Penyusun:

Editor : Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si

Penulis : Bobby Fernando, SST

Pengolah  
data dan grafik : Bobby Fernando, SST

Pembuat Cover : Bobby Fernando, SST



# KATA PENGANTAR

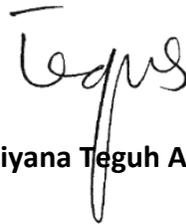
Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Lebong Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen akan keragaman data statistik pada level kabupaten dengan memberikan gambaran umum mengenai kinerja ekonomi dan sosial di Kabupaten Lebong.

Publikasi ini sebagian besar data yang digunakan merupakan data statistik resmi (official statistic) yang berasal dari BPS Kabupaten Lebong. Harapan kami, data yang tersaji dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, tolak ukur kemajuan dan evaluasi kebijakan oleh para pengguna data baik pemerintah, swasta maupun institusi pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian publikasi ini. Saran dan kritik dari para pengguna kami harapkan demi penyempurnaan publikasi berikutnya. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para konsumen data.

Tubei, Oktober 2019

Kepala BPS Kabupaten Lebong



**Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si**



# DAFTAR ISI

Uraian	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KATALOG</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG</b>	<b>1</b>
1. Sekilas Kabupaten Lebong	3
2. Pemerintahan	4
3. Kependudukan	4
4. Ketenagakerjaan	5
<b>BAB II     KINERJA EKONOMI KABUPATEN LEBONG</b>	<b>9</b>
1. Potensi Ekonomi	11
2. Pertumbuhan Ekonomi	12
<b>BAB III    INFLASI DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN</b>	<b>13</b>
1. Inflasi	15
2. Nilai Tukar Petani	18

<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
3. Indeks Tendensi Konsumen	21
<b>BAB IV PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>25</b>
1. Indeks Pembangunan Manusia	27
2. Kemiskinan	32
3. Pendidikan	34
<b>BAB V LAMPIRAN</b>	<b>39</b>

# DAFTAR GAMBAR

<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Gambar 3.1 Inflasi Kota Bengkulu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018	16
Gambar 3.2 Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran di Kota Bengkulu Tahun 2018	17
Gambar 3.3 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Persen)	19
Gambar 3.4 Nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Bengkulu 2018	22
Gambar 4.1 Kuadran Pertumbuhan AHH dan Nilai AHH Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	29
Gambar 4.2 Kuadran Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dan Nilai Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	30
Gambar 4.3 Kuadran Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah dan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	31
Gambar 4.4 Kuadran Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita disesuaikan dan Nilai Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	32



# DAFTAR TABEL

<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 3.1 Perubahan (Y on Y) It, Ib, NTP, BPPBM, dan NTUP Tahun 2018 (Persen)	20
Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebong, 2018	35
Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2018	36
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2018	37



# DAFTAR LAMPIRAN

<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Lampiran 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2018	41
Lampiran 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2014-2018	42
Lampiran 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong (Jiwa), 2014-2018	43
Lampiran 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong (Jiwa), 2018	44
Lampiran 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong (Jiwa),2018	45
Lampiran 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Lebong, 2014-2018	46
Lampiran 7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong,2018	47
Lampiran 8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018	48
Lampiran 9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen),2014-2018	49



# BAB I

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG



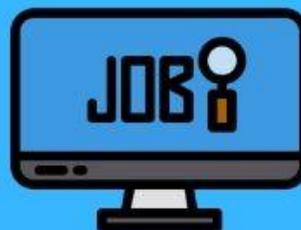
**PENDUDUK LEBONG 2018**

**109.263 JIWA**



**PENDUDUK BEKERJA 2018**

**55.969 JIWA**



**PENGANGGURAN 2018**

**3.790 JIWA**



## 1. SEKILAS KABUPATEN LEBONG

Kabupaten Lebong adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Ibukota Kabupaten bernama Tubei yang lahir pada tanggal 7 Januari 2004 dengan ditetapkannya undang-undang No 39 tahun 2003. Kabupaten Lebong berjarak sekitar 120 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu. Di utara Kabupaten Lebong berbatasan dengan Provinsi Jambi, di timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, dan di barat berbatasan dengan Bengkulu Utara atau tepatnya secara astronomis Kabupaten Lebong terletak antara  $02^{\circ}65'-03^{\circ}60'$  lintang selatan dan  $105^{\circ}-108^{\circ}$  bujur timur.

Dilihat dari luasnya wilayah, Kabupaten Lebong memiliki luas kurang lebih  $1.665,28 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 12 kecamatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan. Jika dilihat dari luas kecamatan di Kabupaten Lebong, maka Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pinang Belapis yaitu  $608,01 \text{ km}^2$  atau 36,51 persen kemudian Kecamatan Topos yaitu  $344,28 \text{ km}^2$  atau 20,67 persen, sedangkan sisanya tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan lainnya. Luas wilayah tersebut berdasarkan analisis spasial tata guna tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tahun 2017.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan didominasi oleh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan serta terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebesar 58,80 persen wilayah Kabupaten

Lebong berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, 33,44 persen berada pada 1000-1500 mdpl, dan sisanya 7,76 persen pada 0-500 mdpl.

## **2. PEMERINTAHAN**

Kabupaten Lebong adalah salah satu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong dipimpin oleh Bupati dengan dibantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. OPD meliputi Sekretariat Daerah, Dinas/Badan daerah, inspektorat daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Lebong berdasarkan sumber Lebong Dalam Angka 2019 pada tahun 2018 sebanyak 104 desa/kelurahan yang terdiri dari 93 desa dan 11 kelurahan dimana desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan sedangkan desa/kelurahan terdikit berada di Kecamatan Rimbo Pengadang dan Lebong Atas sebanyak 6 (enam) desa/kelurahan.

## **3. KEPENDUDUKAN**

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Jumlah penduduk kabupaten Lebong berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar 109.263 jiwa atau tumbuh sebesar 1,55 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Lebong

terdapat di Kecamatan Lebong Utara yaitu sebesar 17.504 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pinang Belapis yaitu sebesar 5.009 jiwa.

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan dinamakan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Lebong sebesar 103, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Jika dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk umur 0 - 4 tahun masih tinggi yaitu 10.090 jiwa atau 9,23 persen penduduk lebong masih berusia 0 - 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran di Kabupaten Lebong masih tergolong tinggi yang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan berkurang seiring dengan bertambahnya usia, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan usia harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Usia harapan hidup perempuan di Kabupaten Lebong sebesar 64,55 tahun sedangkan usia harapan hidup laki-laki sebesar 60,94 tahun.

#### **4. KETENAGAKERJAAN**

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, tenaga kerja mencakup mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja yakni yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lanjut usia, dan anak-anak.

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang bekerja, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari kerja. Adapun bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang tidak melakukan kegiatan dalam katagori bekerja, sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari kerja. Bukan angkatan kerja meliputi ibu rumah tangga, pelajar, dan lainnya.

Variabel yang digunakan untuk menyusun indikator angkatan kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Sensus Penduduk. Semakin tinggi angkatan kerja maka semakin banyak penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingginya angka TPAK memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Perkembangan TPAK Kabupaten Lebong dapat dilihat pada Lampiran 6.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lebong pada tahun 2018 sebesar 70,8 persen, sementara 29,2 persen bukan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja, sebanyak 93,66 persen bekerja dan 6,34 persen merupakan pengangguran terbuka. Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja tidak jauh berbeda. Dari total angkatan kerja laki-laki sebesar 94,42 persen yang bekerja, sedangkan dari total angkatan kerja perempuan sebesar 92,44 persen yang bekerja.

Dari penduduk 15 tahun keatas yang bukan angkatan kerja, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bersekolah relatif seimbang yaitu 2.905 laki-laki dan 2.948 perempuan. Sedangkan yang berstatus mengurus rumah tangga sebesar 1.350 laki-laki dan 14.516 perempuan

dan bukan angkatan kerja lainnya sebesar 2.071 laki-laki dan 812 perempuan.

Tingkat pengangguran dari tahun 2014 hingga 2018 berfluktuatif. Tingkat pengangguran terendah pada tahun 2014 dan 2017 yaitu 3,57 persen. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran kembali meningkat menjadi 6,34 persen. Jika dilihat dari jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2017 merupakan tahun terbaik dengan pengurangan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.821 orang dan peningkatan jumlah orang yang bekerja sebanyak 3.099 orang.



## BAB II

# KINERJA EKONOMI KABUPATEN

## LEBONG

### STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN LEBONG 2018



ADMINISTRASI

PEMERINTAH 11,64 %



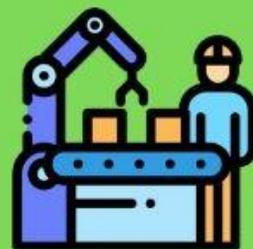
KONSTRUKSI 9,09 %



PERTANIAN 41,99 %



PERDAGANGAN 8,21 %



INDUSTRI PENGOLAHAN 5,7 %



## **1. POTENSI EKONOMI**

Besarnya nilai produksi berbagai lapangan usaha ekonomi sangat menentukan struktur ekonomi Kabupaten Lebong. Struktur ekonomi tersebut memperlihatkan seberapa besar potensi-potensi ekonomi di Kabupaten Lebong. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha. Struktur ekonomi menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Lebong didominasi oleh 5 (lima) katagori lapangan usaha yaitu (a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (b) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, (c) Konstruksi, (d) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, dan (e) Industri Pengolahan. Pada tahun 2018 peranan lapangan usaha tersebut masing-masing adalah 41,99 persen, 11,64 persen, 9,09 persen, 8,21 persen, 5,70 persen. Sedangkan 23,37 persen tersebar hampir merata pada 12 lapangan usaha lainnya.

### **a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Katagori ini mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian, perburuan, kehutanan, penebang kayu, dan perikanan. Kontribusi katagori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB sejak tahun 2014 -2018 selalu berada diatas 40 persen. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 sebesar 3,33 persen, namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 3,69 persen.

Kabupaten Lebong pada tahun 2018 merupakan kabupaten dengan luas panen Padi terbesar ke 4 (empat) dan produksi terbesar ke 4 (empat) diantara kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Potensi padi di Kabupaten Lebong dapat dilihat dari angka produktivitas Padi di Kabupaten Lebong yaitu sebesar 4,89 ton-GKG/ha atau terbesar ke 2 (dua) se kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

#### **b. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2014-2018 kontribusi sektor ini selalu mengalami peningkatan yaitu 10,21 persen hingga 11,64 persen pada tahun 2018. Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhannya meningkat dari 5,68 persen menjadi 11,64 persen pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan selalu terjadi peningkatan anggaran pada sektor pemerintahan baik adanya tenaga kerja baru dan alokasi dana di pemerintahan yang selalu meningkat.

#### **c. Konstruksi**

Kontribusi kategori ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 yaitu sebesar 8,60 persen dan meningkat sebesar 9,09 persen pada tahun 2018. Seiring dengan kontribusi, laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi mengalami peningkatan sejak tahun 2015 yaitu 3,07 persen meningkat menjadi 7,73 persen pada tahun 2018. Selesaiannya beberapa proyek perbaikan

infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan lintas Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara, serta merebaknya proyek pembangunan desa mendorong pertumbuhan katagori ini. Selain itu uteras bertambahnya permintaan akan property di Kabupaten Lebong juga mendorong peningkatan kontribusi ini.

#### **d. Perdagangan Besar dan Eceran , Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.**

Perdagangan besar memiliki kontribusi terhadap perekonomian lebong pada tahun 2018 mencapai 253,9 miliar rupiah atau sekitar 8,21 persen. Secara umum perdagangan besar dan eceran cenderung meningkat selama periode 2014-2018 . Laju pertumbuhan sebesar 6,85 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 7,34 persen pada tahun 2018.

#### **e. Industri Pengolahan**

Industri pengolahan berkontribusi sebesar 176,2 miliar di tahun 2018 atau sebesar 5,7 persen di Perekonomian Lebong. Sektor ini sejak tahun 2014-2018 selalu lebih dari 5 persen di perekonomian Kabupaten Lebong. Berdasarkan data pertumbuhan, industri pengolahan terus meningkat sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 pertumbuhan sector ini mencapai 5,4 persen. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong, Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Lebong sebanyak 570 industri. Industri terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara yaitu sebanyak 192 industri besar sedang.

## **2. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi biasa didefinisikan sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang disebabkan adanya aktivitas ekonomi antara waktu. Perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan mengindikasikan berhasilnya suatu pembangunan ekonomi.

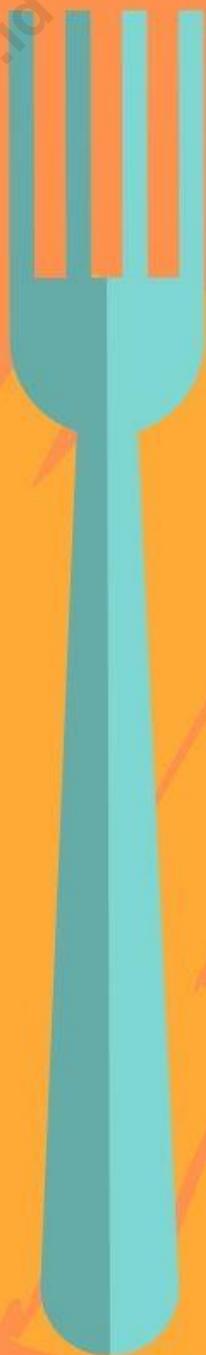
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong pada tahun 2018 sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong pada tahun 2017 yang hanya sebesar 5,00 persen. 5 (lima) sektor lapangan usaha pada tahun 2018 yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu (a) Jasa Lainnya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,34 persen, (b) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,12 persen, (c) Konstruksi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,73 persen, (d) Penyedia akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,36 persen, dan (e) Pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,34 persen. Jika dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan ekonomi maka sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor konstruksi.

# BAB III

## INFLASI DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN



**INFLASI KOTA  
BENGKULU TAHUN  
2018 : 2,35 PERSEN**





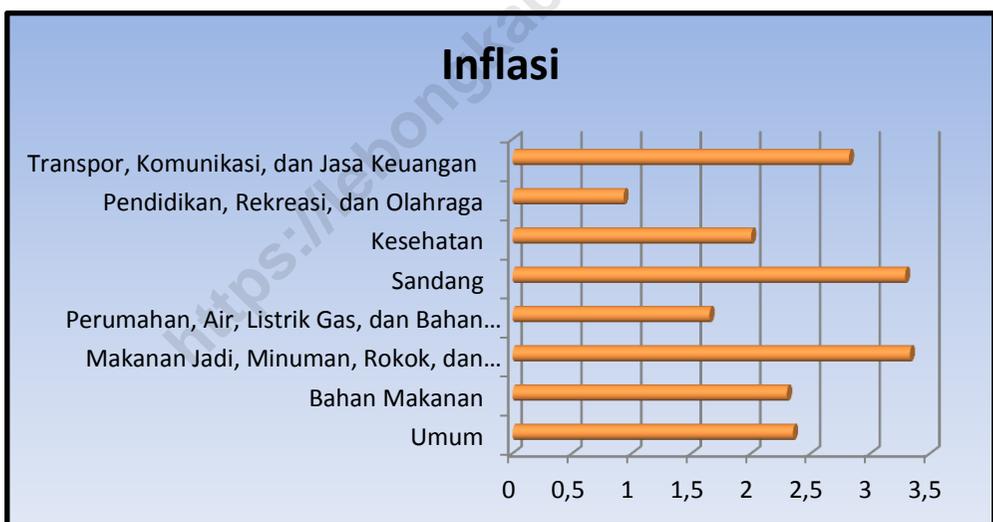
## 1. INFLASI

Perubahan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kurun waktu tertentu disebut inflasi, sedangkan jika terjadi penurunan disebut dengan deflasi. Inflasi merupakan agregat perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Naiknya harga barang dan jasa tersebut (inflasi) akan menyebabkan turunnya nilai mata uang. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Perhitungan perubahan harga secara umum tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu : (1) bahan makanan, (2) makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, (3) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, (4) sandang, (5) kesehatan, (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta (7) transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Penyusunan IHK bertujuan untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga sehingga dapat digunakan sebagai informasi dasar dalam pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro dan makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga dapat memanfaatkan angka inflasi sebagai dasar penyesuaian kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relative tetap, sedangkan pada lingkup makro, angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Perubahan pola konsumsi dan biaya hidup masyarakat mengakibatkan perlunya perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHK. Saat ini perhitungan IHK menggunakan tahun dasar 2012=100. Penggunaan tahun dasar tersebut dimulai pada bulan Januari 2014. Tahun dasar 2012=100 mencakup 82 kota yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 49 kota-kota terbesar di Indonesia dengan cakupan 687 komoditas. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007=100 dan mencakup hanya 62 kota dengan 345 komoditas.

Gambar 3.1 Inflasi Kota Bengkulu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018

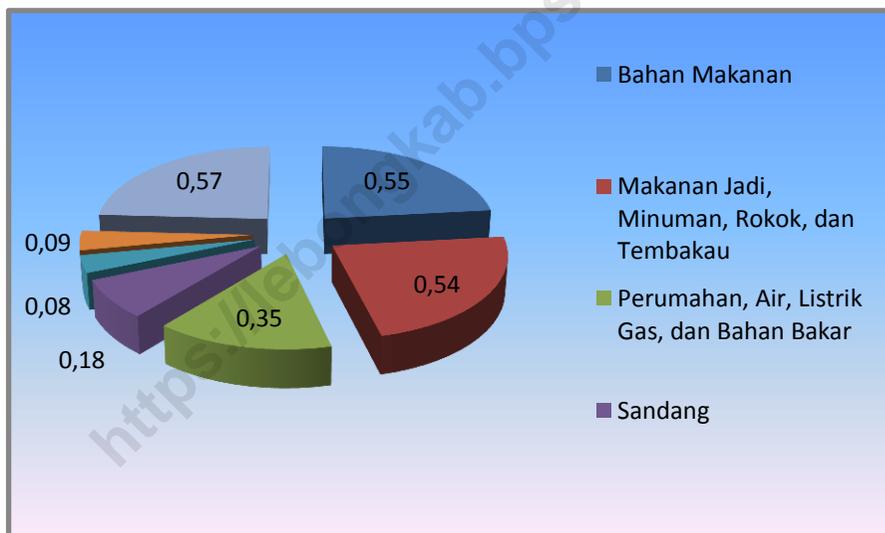


Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Bengkulu 2018

Pada tahun 2018 di Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 2,35 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 139,84 pada bulan Desember 2017 menjadi 143,13 pada bulan Desember 2018. Inflasi tertinggi pada tahun 2018 yaitu pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan nilai 3,33 persen.

Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran sandang, transport, komunikasi dan jasa keuangan, bahan makanan dengan nilai masing yaitu 3,29 persen, 2,82 persen, dan 2,35 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, serta pendidikan, rekreasi, dan olah raga memiliki inflasi dengan nilai 2 persen kebawah.

Gambar 3.2 Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran di Kota Bengkulu Tahun 2018



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Bengkulu 2018

Sepanjang tahun 2018, Kota Bengkulu terjadi 9 (sembilan) bulan kondisi inflasi dan 3 (tiga) bulan kondisi deflasi. Adapun selama tahun 2018 kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan penyumbang terbesar inflasi karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada komoditi angkutan udara, mobil, tarif pulsa ponsel, dan bensin, sedangkan inflasi terendah pada kelompok pengeluaran kesehatan.

## **2. NILAI TUKAR PETANI**

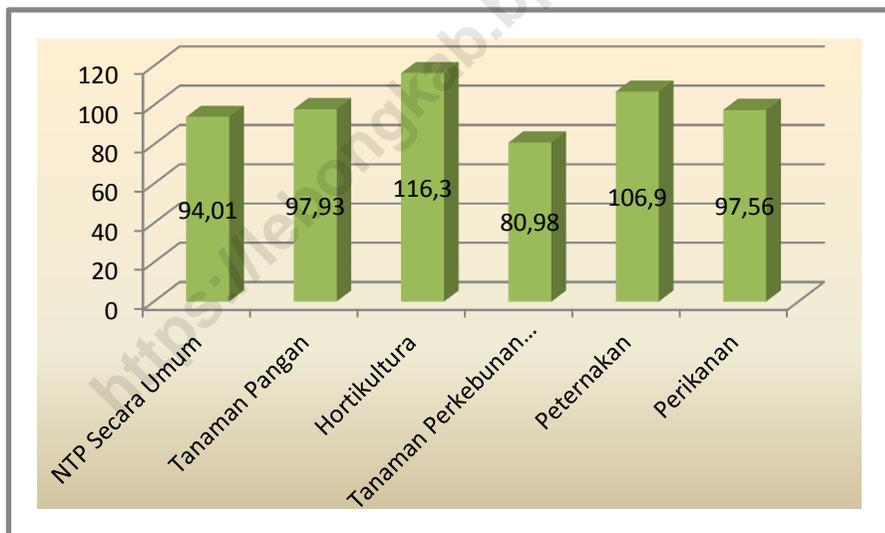
Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani merupakan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di Pedesaan. Pendekatan lain yang dapat melihat kesejahteraan petani selain NTP adalah Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Namun angka NTUP belum memasukkan faktor kebutuhan hidup petani dan hanya melihat balas jasa yang diterima petani atas usaha pertanian yang diusahakan.

Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan bagi Kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu jika dilihat dari peranannya dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan masyarakat. Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB haruslah sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian yaitu Nilai Tukar Petani, yang menggambarkan kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan rill petani dan mengindikasikan peningkatan.

Pada tahun 2018, nilai tukar petani Provinsi Bengkulu sebesar 94,01, artinya nilai tukar yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar yang diterima petani. Kenaikan barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya. Jika dilihat dari subsektor, maka perubahan NTP pada subsektor tanaman perkebunan rakyat

dan peternakan mengalami penurunan daya beli pertanian pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan perubahan NTP paling tinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan yaitu sebesar 4,56 persen. Diikuti subsektor perikanan tangkap dan subsektor perikanan yang nilainya masing-masing 1,89 persen dan 1,48 persen. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa daya beli petani pada subsektor ini dapat semakin membaik kondisinya dibanding tahun 2017.

Gambar 3.3 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Persen)



Sumber : Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu 2018

Jika dilihat dari perubahan indeks harga yang diterima petani (It) tahun 2018 yaitu sebesar 3,61 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan harga-harga produk sektor pertanian meningkat selama tahun 2018 sebesar 3,61 persen terhadap tahun 2017. Semua It subsektor mengalami peningkatan dengan subsektor tanaman pangan yang tertinggi yaitu mencapai 8,76 persen diikuti oleh

subsektor perikanan tangkap dengan pertumbuhan sebesar 6,67 persen. Sedangkan subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 0,65 persen artinya produk pertanian tanaman perkebunan rakyat secara total tahun 2018 hanya mengalami sedikit kenaikan harga dibandingkan tahun 2017.

Tabel 3.1 Perubahan (Y on Y) It, lb, NTP, BPPBM, dan NTUP Tahun 2018 (persen)

Subsektor	It	lb	NTP	BPPBMN	NTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Pangan	8,76	4,01	4,56	3,57	5,01
Hortikultura	5,26	3,86	1,35	2,02	3,17
Tanaman Perkebunan Rakyat	0,65	4,39	-3,58	4,25	-3,45
Peternakan	2,61	3,72	-1,07	3,21	-0,58
Perikanan	5,9	4,36	1,48	3,54	2,29
-Perikanan Tangkap	6,67	4,69	1,89	4,75	1,83
-Perikanan Budidaya	5,58	4,24	1,29	3,07	2,44
Pertanian	3,61	4,14	-0,51	3,6	0

Sumber : Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu 2018

Perkembangan indeks harga yang dibayar petani (lb) tahun 2018 adalah sebesar 4,14 persen. Semua lb subsektor mengalami peningkatan dan lb subsektor perikanan tangkap yang paling tinggi yaitu sebesar 4,69 persen dan paling rendah subsektor peternakan dengan pertumbuhan sebesar 3,72 persen. Indeks yang dibayar petani

(lb) terdiri dari komponen harga-harga barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga petani dan input produksi.

Pada tahun 2018, Nilai NTUP Provinsi Bengkulu sebesar 104,55 yang berarti usaha petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa untuk biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari biaya produksi sehingga tingkat usaha petani dapat lebih baik dibandingkan tingkat usaha petani sebelumnya.

Dilihat dari perubahan NTUP, NTUP Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan atau nilai NTUP tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan rasio rata-rata It dan rata-rata Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBMN) pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sama. Jika dilihat persubsektor. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan tertinggi dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 3,45 persen. Perubahan NTUP tertinggi adalah subsektor tanaman pangan yaitu mencapai 5,01 persen, diikuti subsektor hortikultura sebesar 3,17 persen dan subsektor perikanan budidaya sebesar 2,44 persen. Tidak adanya perubahan NTUP menunjukkan balas jasa yang diterima petani atas produk yang diusahakan oleh petani masih sama seperti tahun 2017.

### **3. INDEKS TENDENSI KONSUMEN**

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Bengkulu adalah indikator perkembangan ekonomi berdasarkan pola konsumsi konsumen (rumah tangga) yang dihasilkan Badan Pusat Statistik Melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. Pemerintah

memerlukan informasi ini untuk perencanaan, sedangkan bagi kalangan dunia usaha berguna untuk keperluan investasi, ekspansi pasar atau penentuan harga produk. Sementara itu bagi kalangan rumah tangga, informasi ini akan berguna bagi mereka untuk referensi belanja atau melakukan portofolio investasi.

Gambar 3.4 Nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Bengkulu 2018



Sumber : Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Bengkulu 2018

Indeks tendensi konsumen pada triwulan I-2018 memiliki nilai sebesar 100,81. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2017. Pada triwulan berikutnya terlihat bahwa kondisi ekonomi konsumen mengalami peningkatan, dengan tingkat optimism yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai indeks tendensi konsumen pada triwulan II-2018 mencapai 124,86. Hal ini disebabkan

karena adanya puasa Ramadhan dan Hari raya idul fitri sehingga pendapatan responden dan volume konsumsinya meningkat tajam.

Persepsi konsumen akan kondisi ekonominya menurun pada triwulan III-2018 dan IV-2018. Pada triwulan III-2018 indeks tendensi konsumen mencapai 98,03, sedangkan triwulan IV-2018 sebesar 98,71. Pesimisme konsumen selama dua triwulan terakhir ini lebih disebabkan karena penurunan pendapatan yang dialami oleh konsumen. Pandangan konsumen tersebut digambarkan oleh indeks tendensi konsumen yang dipengaruhi oleh tiga komponen : pendapatan rumah tangga, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumen, dan tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi dan bukan makanan.



# BAB IV

## PEMBANGUNAN MANUSIA



**USIA HARAPAN HIDUP : 62,73 TAHUN**

**HARAPAN LAMA SEKOLAH : 12,30 TAHUN**

**RATA-RATA LAMA SEKOLAH : 7,89 TAHUN**



**PENGELUARAN : 11,071 JUTA/TAHUN**



## 1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

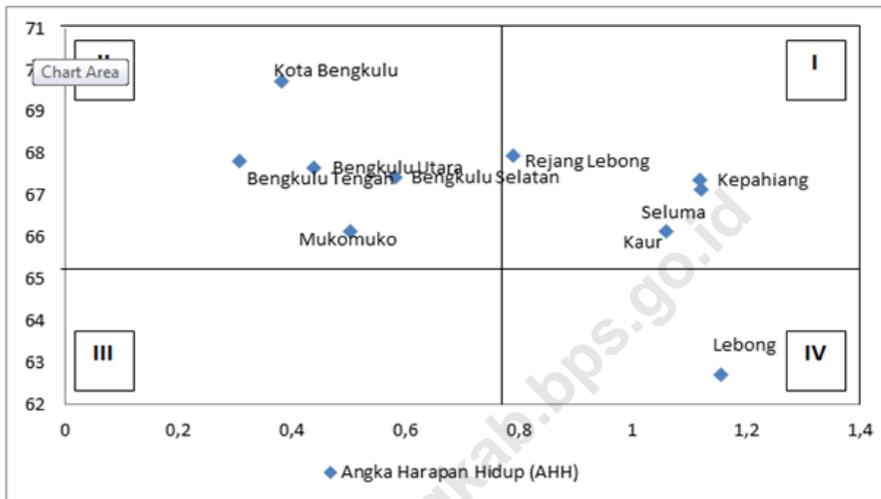
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menggunakan tiga dimensi dasar dalam perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Pengetahuan dihitung dari angka dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Standar hidup layak dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB)/Keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita.

IPM merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Untuk Indonesia, IPM merupakan indikator strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) :

- 1) Katagori sangat tinggi (IPM>80)
- 2) Katagori tinggi (70<IPM<80)
- 3) Katagori sedang atau menengah (60<IPM<70)
- 4) Katagori rendah (IPM<60)

Pada tahun 2018, angka IPM Kabupaten Lebong sebesar 66,28 meningkat dibandingkan dengan angka IPM tahun 2017 yaitu sebesar 65,87. Angka tersebut masih dalam kategori sedang atau menengah. Jika dirinci berdasarkan komponen pembentuk, nilai IPM untuk angka harapan hidup pada tahun 2018 sebesar 62,73, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2018 di Kabupaten Lebong diperkirakan akan dapat hidup sampai usia 62 atau 63 tahun. Nilai IPM untuk komponen Angka Harapan Sekolah Lebong pada tahun 2018 sebesar 12,30, artinya lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak umur 7 (tujuh) tahun keatas di Kabupaten Lebong dimana mendatang selama 12,30 tahun atau setara dengan pendidikan SMA dan memasuki Diploma I. Nilai IPM untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sebesar 7,89, artinya rata-rata lama sekolah penduduk berusia diatas 25 tahun telah menempuh pendidikan selama 7,89 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII SMP. Nilai IPM untuk komponen Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Lebong tahun 2018 sebesar 11.071, artinya pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Lebong tahun 2018 sebesar 11,071 juta rupiah.

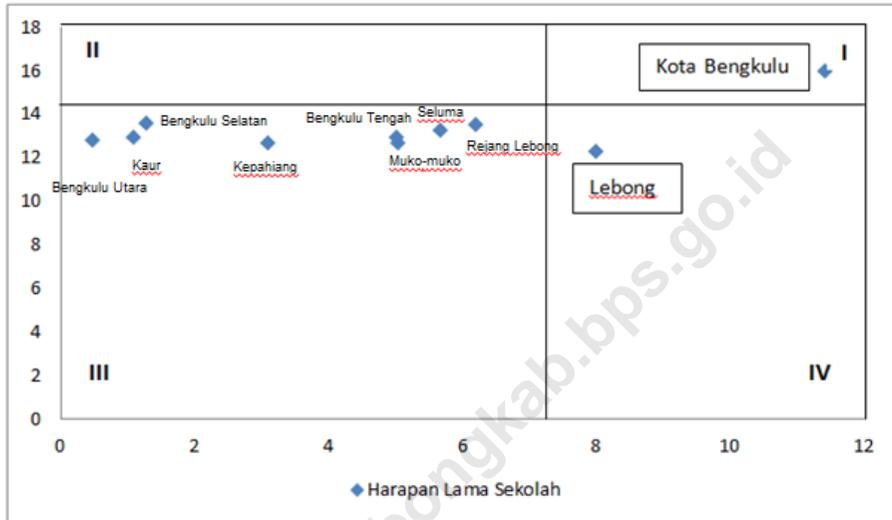
Gambar 4.1 Kuadran Pertumbuhan AHH dan Nilai AHH Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber : Nilai Angka Harapan Hidup Kab. Lebong (Diolah).

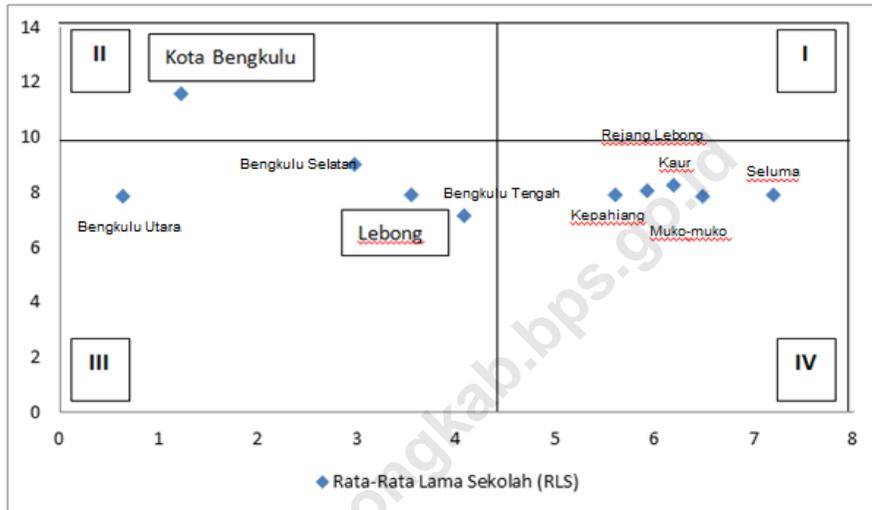
Jika dilihat antar kabupaten maka Kabupaten Lebong memiliki nilai pertumbuhan komponen IPM usia harapan hidup yang tinggi namun memiliki angka yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan semakin membaik lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya sejak tahun 2014 hingga 2018.

Gambar 4.2 Kuadran Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dan Nilai Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



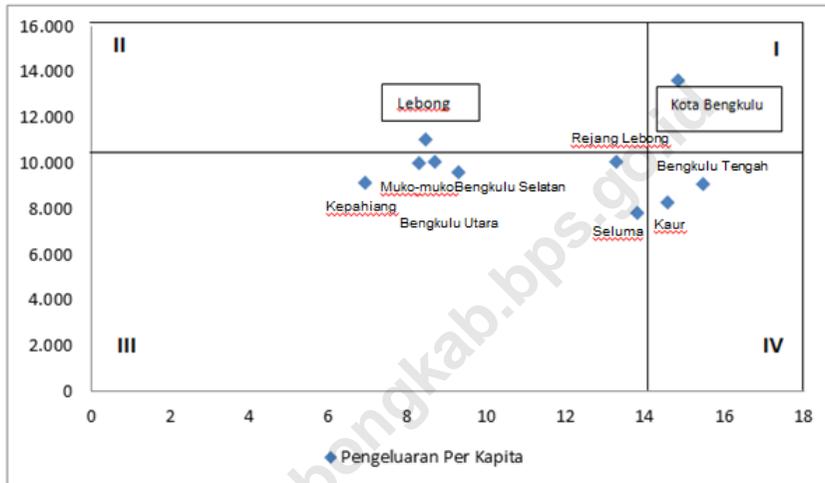
Untuk komponen IPM Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Lebong memiliki nilai harapan lama sekolah yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya namun nilai pertumbuhan harapan lama sekolah lebong tertinggi kedua setelah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa minat/harapan penduduk Kabupaten Lebong untuk bersekolah semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Gambar 4.3 Kuadran Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah dan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Untuk komponen IPM Rata-rata Lama Sekolah, Kabupaten Lebong memiliki nilai rata-rata lama sekolah yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya namun nilai pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Lebong juga masuk ke katagori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesempatan penduduk Kabupaten Lebong untuk bersekolah hingga ke jenjang lebih tinggi, juga menunjukkan bahwa harapan dengan realita yang ada sangat jauh berbeda. Harapan lama sekolah yang tinggi namun keadaan sekarang yaitu rata-rata lama bersekolah masihlah sangat rendah.

Gambar 4.4 Kuadran Pertumbuhan Pengeluaran perkapita disesuaikan dan Nilai Pengeluaran perkapita disesuaikan Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Pada komponen IPM pengeluaran perkapita yang disesuaikan, Kabupaten Lebong memiliki angka pengeluaran perkapita yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, namun nilai pertumbuhan yang rendah. Hal ini menunjukkan pengeluaran masyarakat Kabupaten Lebong termasuk dalam katagori yang tinggi. Namun pertumbuhan dari tahun ke tahun pengeluaran masyarakat Kabupaten Lebong masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

## 2. KEMISKINAN

Ukuran kemiskinan yang diterapkan BPS dalam mengukur penduduk miskin di Indonesia menggunakan konsep kemiskinan absolut yang berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang direpresentasikan dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 13.248 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 389.973/kapita/bulan, menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 13.314 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 362.700/kapita/jiwa. Sedangkan berdasarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,59 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 11,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Lebong dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah mengenai kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode 2017 dan 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Lebong pada tahun 2018 sebesar 1,63 menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 1,46, artinya jarak pengeluaran rumah tangga kemiskinan semakin jauh dengan garis kemiskinan dengan demikian

dapat disimpulkan dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2017 pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Lebong semakin baik. Jika dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Lebong pada tahun 2018 sebesar 0,33, menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,39. Nilai indeks keparahan kemiskinan menurun mengartikan bahwa jarak pengeluaran antar rumah tangga miskin semakin kecil. Semakin dekatnya pengeluaran antar rumah tangga miskin mengindikasikan kehidupan penduduk Kabupaten Lebong semakin membaik.

### **3. PENDIDIKAN**

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan dasar merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan, kemudahan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan tinggi merupakan salah satu tuntutan era globalisasi. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Modal dasar yang berkualitas adalah tujuan negara dalam upaya mempersiapkan SDM yang mampu bersaing dalam pasar kerja global.

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebong, 2018

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,97	96,24	57,59
Perempuan	100	97,42	82,48
Total	99,41	96,91	70,04

Sumber : SUSENAS 2018, Diolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dengan persentase. Angka partisipasi sekolah Kabupaten Lebong semakin menurun pada kelompok umur yang lebih tinggi. Pada usia 7-12 tahun, APS Kabupaten Lebong sebesar 99,46 persen. Pada usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi laki-laki. Pada usia 13-15 tahun APS Kabupaten Lebong sebesar 96,91 persen. Pada usia ini angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih besar dibandingkan dengan partisipasi sekolah laki-laki. Begitu juga dengan usia 16-18 tahun, APS Kabupaten Lebong sebesar 70,04 persen, dimana APS perempuan juga lebih besar dibandingkan dengan APS laki-laki.

Salah satu keberhasilan program pemerintah di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa yang sedang sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu tersebut. Kelompok umur 7-12 tahun setara dengan jenjang pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun setara dengan jenjang pendidikan SMP, dan kelompok umur 16-18 tahun setara dengan jenjang pendidikan SMA.

Pada tabel 4.2 tampak bahwa kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lebong pada jenjang pendidikan SD sebesar 114,71 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa jumlah anak yang sekolah pada jenjang pendidikan SD lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan kata lain, di Kabupaten Lebong masih terdapat penduduk berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun dan/atau berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Kasar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2018

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	111,09	88,23	79,55
Perempuan	119,61	90,84	103,29
Total	114,71	89,71	91,43

Sumber : SUSENAS 2018, Diolah

Pada jenjang pendidikan SMP, nilai APK Kabupaten Lebong sebesar 89,71 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA nilai APK Kabupaten Lebong sebesar 91,43 persen, lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mulainya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi pada masyarakat di Kabupaten Lebong.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah angka partisipasi murni (APM). APM adalah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai, dinyatakan dalam persen.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong,2018

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,97	78,23	51,26
Perempuan	100	78,12	71,6
Total	99,41	78,17	61,44

Sumber : SUSENAS 2018, Diolah

Angka APM Kabupaten Lebong semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil. Angka APM di jenjang pendidikan SMA sebesar 61,44 persen menunjukkan bahwa hanya 61,44 persen dari penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya yaitu SMA.

Ditinjau dari jenis kelamin, partisipasi usia sekolah perempuan pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi sekolah laki-laki, kecuali pada jenjang pendidikan SMP. Hal ini menunjukkan pada usia sekolah yang sesuai, jenis kelamin perempuan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



# LAMPIRAN

<https://lebongkab.bps.go.id>



Lampiran 1  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Lebong, 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rimbo Pengadang	85,71	5,15
2.	Topos	344,28	20,67
3.	Lebong Selatan	211,69	12,71
4.	Bingin Kuning	86,89	5,22
5.	Lebong Sakti	88,69	5,33
6.	Lebong Tengah	70,97	4,26
7.	Amen	17,28	1,04
8.	Uram Jaya	42,95	2,58
9.	Lebong Utara	32,10	1,93
10.	Pinang Belapis	608,01	36,51
11.	Pelabai	40,71	2,44
12.	Lebong Atas	36,00	2,16
	Kabupaten Lebong	1.665,28	100

Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Lampiran 2  
 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan  
 di Kabupaten Lebong, 2014-2018

<b>Kecamatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	6	6	6	6	6
Topos	8	8	8	8	8
Lebong Selatan	10	10	10	10	10
Bingin Kuning	9	9	9	9	9
Lebong Tengah	11	11	11	11	11
Lebong Sakti	9	9	9	9	9
Lebong Atas	6	6	6	6	6
Padang Bano	5	5	-	-	-
Pelabai	8	8	8	8	8
Lebong Utara	12	12	12	12	12
Amen	10	10	10	10	10
Uram Jaya	7	7	7	7	7
Pinang Belapis	8	8	8	8	8
<b>Lebong</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

Sumber : Lebong Dalam Angka 2019

Lampiran 3  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di  
Kabupaten Lebong (jiwa), 2014-2018

<b>Kecamatan</b>	<b>2014*</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
RIMBO PENGADANG	4 907	4 962	5 016	5 105	5 183
TOPOS	6 164	6 253	6 340	6 453	6 553
LEBONG SELATAN	14 671	14 949	15 223	15 494	15 734
BINGIN KUNING	10 371	10 543	10 711	10 902	11 071
LEBONG TENGAH	10 720	10 865	11 004	11 200	11 373
LEBONG SAKTI	9 038	9 214	9 386	9 554	9 701
LEBONG ATAS	5 041	5 200	5 361	5 456	5 540
PADANG BANO	5 211	5 280	5 348	-	-
PELABAI	7 002	7 234	7 467	7 602	7 719
LEBONG UTARA	16 503	16 723	16 934	17 236	17 504
AMEN	7 513	7 678	7 843	7 983	8 106
URAM JAYA	5 428	5 506	5 583	5 682	5 770
PINANG BELAPIS	4 732	4 791	4 847	4 933	5 009
<b>Jumlah</b>	<b>107 300</b>	<b>109 200</b>	<b>111 063</b>	<b>107 600</b>	<b>109 263</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Lampiran 4  
 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
 di Kabupaten Lebong (jiwa), 2018

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki- Laki	Perempuan		
Rimbo Pengadang	2.659	2.524	5.183	105
Topos	3.304	3.249	6.553	102
Lebong Selatan	8.030	7.704	15.734	104
Bingin Kuning	5.581	5.490	11.071	102
Lebong Tengah	5.755	5.618	11.373	102
Lebong Sakti	4.869	4.832	9.701	101
Lebong Atas	2.843	2.697	5.540	105
Pelabai	3.960	3.759	7.719	105
Lebong Utara	8.819	8.685	17.504	102
Amen	4.097	4.009	8.106	102
Uram Jaya	2.876	2.894	5.770	99
Pinang Belapis	2.624	2.385	5.009	110
<b>Jumlah</b>	<b>55.417</b>	<b>53.846</b>	<b>109.263</b>	<b>103</b>

Sumber: Kabupaten Lebong Dalam Angka 2019

Lampiran 5  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan  
Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong (jiwa), 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	5 078	5 012	10 090
5 - 9	5 420	5 126	10 546
10 - 14	5 199	5 118	10 317
15 - 19	4 940	4 621	9 561
20 - 24	4 647	4 300	8 947
25 - 29	4 888	4 710	9 598
30 - 34	4 485	4 531	9 016
35 - 39	4 668	4 376	9 044
40 - 44	3 781	3 820	7 601
45 - 49	3 399	3 237	6 636
50 - 54	3 040	2 783	5 823
55 - 59	2 218	2 059	4 277
60 - 64	1 471	1 376	2 847
65 - 69	922	933	1 855
70 - 75	636	829	1 465
75+	625	1 015	1 640
<b>Jumlah</b>	<b>55 417</b>	<b>53 846</b>	<b>109 263</b>

Sumber: Kabupaten Lebong Dalam Angka 2019

Lampiran 6

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2014-2018

Kegiatan Utama					
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>54.708</b>	<b>57.584</b>	-	<b>58.862</b>	<b>59.759</b>
Bekerja	52.754	53.661	-	56.760	55.969
Pengangguran Terbuka	1.954	3.923	-	2.102	3.790
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>22.730</b>	<b>21.647</b>	-	<b>23.775</b>	<b>24.602</b>
<b>Jumlah</b>	<b>77.438</b>	<b>79.231</b>	-	<b>82.637</b>	<b>84.361</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>70,65</b>	<b>72,68</b>	-	<b>71,23</b>	<b>70,84</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>	<b>3,57</b>	<b>6,81</b>	-	<b>3,57</b>	<b>6,34</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Lampiran 7  
 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis  
 Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di  
 Kabupaten Lebong,2018

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>36 626</b>	<b>23 133</b>	<b>59 757</b>
Bekerja	34 584	21 385	55 969
Pengangguran Terbuka	24 042	1 748	3 790
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>6 326</b>	<b>18 276</b>	<b>24 602</b>
Sekolah	2 905	2 948	5 853
Mengurus Rumah Tangga	1 350	14 516	15 866
Lainnya	2 071	812	2 883
<b>Jumlah</b>	<b>42 952</b>	<b>41 409</b>	<b>84 361</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>85,27</b>	<b>55,86</b>	<b>70,84</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>	<b>5.58</b>	<b>7.56</b>	<b>6.34</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

## Lampiran 8

### Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014–2018

Katagori (1)	Lapangan Usaha (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,46	42,88	43,14	42,65	41,99
B	Pertambangan dan Penggalian	6,22	6,06	5,66	5,60	5,42
C	Industri Pengolahan	5,91	5,74	5,55	5,68	5,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
F	Konstruksi	8,72	8,60	8,75	8,86	9,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,71	7,66	7,81	8,01	8,21
H	Transportasi dan Pergudangan	4,05	4,16	4,15	4,15	4,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,16	1,20	1,25	1,28
J	Informasi dan Komunikasi	1,51	1,50	1,50	1,50	1,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,14	1,11	1,11	1,09
L	Real Estat	5,63	5,71	5,53	5,45	5,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,21	10,98	11,18	11,31	11,64
P	Jasa Pendidikan	2,51	2,54	2,51	2,46	2,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,76	0,78	0,79	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,56	0,59	0,60	0,65	0,67
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong Tahun 2014-  
2018

## Lampiran 9

### Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018

Katagori (1)	Lapangan Usaha (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77	3,47	4,06	3,69	3,33
B	Pertambangan dan Penggalian	5,41	3,08	2,39	0,10	1,55
C	Industri Pengolahan	9,00	5,03	6,25	6,10	5,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,33	-0,08	16,89	4,97	5,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,18	1,99	1,95	3,25	3,80
F	Konstruksi	5,98	3,07	5,84	6,21	7,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,85	6,95	8,44	8,12	7,34
H	Transportasi dan Pergudangan	5,14	7,22	3,91	6,24	6,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	8,90	9,24	8,48	7,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,47	6,59	7,79	6,36	6,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,11	3,67	5,19	4,05	3,84
L	Real Estat	8,21	7,71	4,78	5,12	4,42
M,N	Jasa Perusahaan	5,22	7,33	4,20	5,33	4,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,68	8,12	7,15	7,19	8,12
P	Jasa Pendidikan	8,65	8,56	5,44	5,83	5,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	8,57	7,25	6,76	5,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,60	8,85	6,49	10,81	8,34
Produk Domestik Regional Bruto		<b>5,44</b>	<b>4,99</b>	<b>5,16</b>	<b>5,00</b>	<b>5,01</b>

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong Tahun 2014-2018